

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Segala aktivitas operasional dan non operasional yang dijalankan perusahaan dalam mencapai tujuannya mesti selalu berdampingan dengan pengendalian di berbagai aspek bidang. Pengendalian intern diharapkan mampu memberi manfaat bagi perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasional. Dengan begitu, aktivitas non operasional pun dapat berjalan normal, tidak ada hambatan dikarenakan aktivitas operasi, dan aktivitas tetap dijalankan sesuai dengan koridor yang benar.

Pengendalian internal dibuat untuk segala tindakan di dalam sebuah organisasi agar memberikan keamanan terhadap aset dari pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan penggunaan, serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas menjadi penentu keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Penting adanya, sebelum auditor melaksanakan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan untuk memahami pengendalian intern yang berlaku dalam entitas dan menurut Standar Internasional Audit (ISA) 315 alinea 12, auditor juga wajib memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit. Tidak semua pengendalian yang berkaitan dengan pelaporan keuangan relevan dengan audit. Pertimbangan profesional auditorlah yang menentukan apakah pengendalian yang dilakukan secara individual atau gabungan dengan pengendalian lain, memang relevan dengan audit.

Suatu organisasi perusahaan juga tak terlepas dari proses transaksi penjualan secara kredit. Ini merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk memudahkan proses transaksi dan menarik minat pelanggan serta mempertahankan pangsa pasar agar dapat menunjukkan kemampuan perusahaan di dalam persaingan dengan perusahaan sejenis. Dari transaksi penjualan kredit ini akan memunculkan adanya piutang usaha. Selanjutnya pada piutang usaha ini akan ada saat yang dinamakan jatuh tempo, biasanya akan terjadi aliran kas masuk (*cash in flow*) oleh pelanggan atau konsumen yang berasal dari akumulasi nilai piutang yang terkumpul.

Piutang usaha merupakan aset perusahaan yang sifatnya paling lancar atau likuid setelah kas sehingga sangat mudah terjadinya penyelewengan yang akan mempengaruhi pendapatan operasional perusahaan. Maka dari itu, entitas manapun harus senantiasa melakukan pengendalian intern terhadap piutang usaha, karena hal ini berkaitan langsung dengan penerimaan pendapatan nantinya. Semakin baik proses penagihan dan pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen perusahaan terhadap piutang usaha, maka akan meminimalisir terjadinya piutang tak tertagih. Manajemen tidak hanya bertanggung jawab untuk meningkatkan penjualan dalam menciptakan laba, tetapi juga perlu meyakinkan bahwa piutang usaha tersebut dapat ditagih. Piutang usaha harus memiliki suatu kebijakan atau sistem tersendiri baik yang menyangkut jumlah piutang, cara pemberian piutang, dan evaluasi terhadap piutang tersebut.

Dalam hal ini, pengendalian intern terhadap piutang usaha sangat penting diterapkan, mengingat banyak kecurangan dalam satu siklus kerja yang mungkin

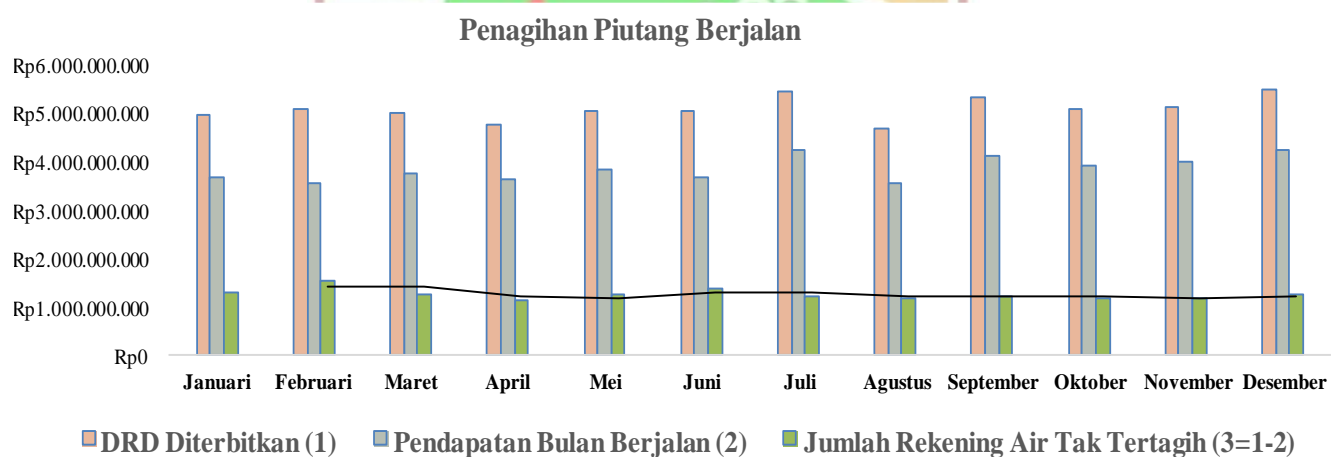
akan terjadi. Dengan evaluasi dari pengendalian intern, situasi seperti: tidak mencatat pembayaran debitur dan mengantongi uang untuk kepentingan pribadi pihak manajemen, menunda pencatatan piutang dengan melakukan *cash lapping*, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang, kelalaian dalam penagihan, dan lain-lain dapat diawasi dan di kontrol sehingga hal tersebut tidak akan terjadi di kemudian hari.

Sebagaimana kita ketahui, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum merupakan salah satu entitas tanpa akuntabilitas publik yang diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar dengan data akuntansi yang tepat, sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipercaya serta tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan. Untuk itu, pihak perusahaan harus melakukan pencatatan dan evaluasi yang benar agar tidak terjadi kesalahan pencatatan ataupun penyajian didalam laporan keuangan dan juga menghindari adanya kecurangan atau *fraud*.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum adalah suatu entitas yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan melakukan penjualan air bersih. Wilayah pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang yang tersebar atas 3 area yaitu: wilayah pelayanan pusat, wilayah pelayanan utara, dan wilayah pelayanan selatan memiliki sub bagian Penagihan yang selalu diawasi oleh Divisi Pengawasan Internal Perumda Air Minum Kota Padang. Masyarakat, khususnya warga kota Padang umumnya sudah berlangganan dengan Perumda Air Minum Kota Padang sebagai konsumen tetap dan memiliki tagihan rekening air yang beragam sesuai dengan jumlah

pemakaian air disetiap rumah dan instansi. Tagihan tersebut merupakan hasil dari nilai perhitungan pemakaian air pelanggan oleh subag penagihan dan baca meter. Nilai tagihan inilah yang menjadi nilai piutang usaha Perumda Air Minum Kota Padang dalam menjual air.

Namun, kenyataannya tagihan rekening air tidak seluruhnya mampu ditagih oleh Subag Penagihan Perumda Air Minum Kota Padang. Menurut data pada Laporan Bulanan Area Pelayanan Pusat dan RKAP Perumda Air Minum Tahun 2019 masih terjadi penambahan tagihan per bulan atau lazimnya dikenal dengan jumlah rekening air tak tertagih yang secara grafis akan terlihat sebagai berikut:



Gambar 1.1

Sumber: *Laporan Bulanan Area Pelayanan Pusat dan RKAP Perumda Air Minum Kota Padang Tahun 2019*

Berdasarkan tabel diatas, tagihan rekening pelanggan yang diterbitkan oleh Perumda Air Minum untuk bulan November adalah Rp5.132.557.500,00 dan penerimaan pada bulan tersebut hanya Rp 3.984.306.000,00 menunjukkan bahwa pendapatan tidak sepenuhnya tertagih oleh perusahaan, karena masih ada Rp1.148.251.500,00

rekening air yang belum tertagih pada bulan tersebut, yang nantinya akan menambah tagihan pada bulan berikutnya yaitu bulan Desember. Jika kita bandingkan rekening tak tertagih antara bulan November dengan bulan Desember, jumlah rekening air yang belum tertagih pada bulan Desember saja sebesar Rp1.232.705.200,00 menimbulkan kenaikan rekening air yang tak tertagih sebesar Rp84.453.700,00.

Memang, jumlah penduduk dan strata sosial-ekonomi (golongan) masyarakat kota Padang serta frekuensi pemakaian air yang beragam di masing-masing wilayah pelayanan menyebabkan beragam pula jumlah tagihan dan pendapatan atas penagihan piutang di setiap wilayah tersebut. Sehingga membutuhkan upaya yang besar bagi Divisi Pengawasan Internal Perumda Air Minum Kota Padang untuk mengontrol dan mengawasi penerimaan pendapatan rekening air tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur Divisi Pengawasan Internal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang melakukan pengendalian intern akan piutang usaha?
2. Bagaimanakah pengaruh pengendalian intern terhadap efisiensi dan efektivitas penagihan piutang oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui alur prosedur Divisi Pengawasan Internal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang dalam melakukan pengendalian intern akan piutang usaha
2. Untuk menilai pengaruh pengendalian intern terhadap tingkat efisiensi dan efektivitas penagihan piutang pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang

1.4. Metode Penelitian

Dalam hal ini, saya melakukan kegiatan magang yang bertempat di kantor Perumda Air Minum Kota Padang Kota Padang Jl. H. Agus Salim No. 10, Kota Padang. Kegiatan magang dilaksanakan selama lebih kurang 40 hari. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dan interview (wawancara).

1.5. Sistematika Penulisan

Inilah gambaran umum atau konten yang akan dibahas pada **“Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Usaha Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang”**:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat uraian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan **“Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Usaha Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang”**

BAB II: LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan konsep dan teori yang sehubungan dengan “**Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Usaha Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang**”, yaitu:

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern
2. Peran sistem Pengendalian Intern
3. Klasifikasi Pengendalian Intern
4. Komponen Sistem Pengendalian Intern-COSO
5. Pengertian Piutang Usaha
6. Pengukuran atau Penilaian Piutang Usaha
7. Pengakuan atas Piutang Usaha
8. Pengungkapan Piutang Usaha
9. Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG KOTA PADANG

Bagian ini menjelaskan tentang profil Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang yang berisi penjelasan mengenai sejarah singkat Perumda Air Minum Kota Padang, visi dan misi Perumda Air Minum Kota Padang, tugas dan fungsi Perumda Air Minum Kota Padang, serta makna lambang Perumda Air Minum Kota Padang.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang penjelasan dari:

1. Prosedur audit pada pengendalian intern Perumda Air Minum
2. Kolektibilitas (penagihan) piutang usaha Perumda Air Minum
3. Pengawasan penagihan piutang usaha pada Perumda Air Minum Kota Padang

4. Evaluasi efisiensi dan efektivitas penagihan piutang dalam pengendalian intern Perumda Air Minum Kota Padang
5. Upaya Pengendalian Piutang Tidak Tertagih

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga menjelaskan saran untuk hasil penelitian.

